

**ANALISIS RASIO ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
TAHUN 2013-2017**

**Yun Fitriano<sup>1</sup>**

**E-mail : [yun.fitriano@gmail.com](mailto:yun.fitriano@gmail.com)**

**Ahmad Soleh<sup>2</sup>**

**E-mail : [ahmadsolehse81@yahoo.co.id](mailto:ahmadsolehse81@yahoo.co.id)**

**Revaldo Khairullah<sup>3</sup>**

**E-mail : [revaldokhairullah@gmail.com](mailto:revaldokhairullah@gmail.com)**

**UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out: 1) the financial performance of Kepahiang Regency Government based on the results of the calculation of the independence ratio, 2) the financial performance of the Kepahiang Regency Government based on the results of the calculation of fiscal decentralization degree ratios, 3) the financial performance of Kepahiang Regency Government based on the results of calculation of the effectiveness ratio, 4) the financial performance of the Kepahiang Regency Government based on the results of the calculation of financial efficiency ratios, 5) the financial performance of the Kepahiang Regency Government based on the results of the calculation of the financial dependency ratio. The data were collected using documentation and analyzed through financial ratios. The results of the study revealed the regional financial likelihood ratio with an average ratio of 4.70% in the interval 0% -25% with very low criteria and intrurctive relations patterns, meaning that the Regional Government of Kepahiang Regency was not yet independent. Fiscal decentralization degree ratio with an average ratio of 4.45% at an interval of 0.00% - 10% with very poor criteria, meaning that the Regional Government of Kepahiang Regency has not been able to carry out decentralization or the authority and responsibility given by the Central Government to the Government Area. The effectiveness ratio with an average ratio of 103.82% with very effective criteria, means that the Regional Government of Kepahiang Regency is able to realize the budget or PAD targets that have been set even though in 2014 and 2017 were quite effective and 2015 was less effective. Regional financial efficiency ratio with an average ratio of 90,84% with the criteria of less efficient, meaning that regional spending or expenditure in Kepahiang Regency is still very high compared to PAD. Regional financial dependency ratio with an average ratio of 94,63% with very high criteria, meaning that the Regional Government of Kepahiang Regency has a very high dependence on the Provincial Government and the Central Government to finance regional expenditure.*

**Keywords: Ratio, Regional Income and Expenditure Budget**

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan PAD, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain.

Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya.

Pemerintah daerah menurut UU Nomor 23 tahun 2014 adalah organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dan asas perbantuan dalam sistem NKRI. Penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, walikota dan perangkat lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lain yang di atur oleh sekretaris daerah). Tujuan utama dari suatu pemerintah daerah adalah menjalankan otonomi daerah yang seluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang terjadi urusan pemerintah, dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pemeritahan kabupaten Kepahiang tengah dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, transparansi dan akuntabel. Pelaksanaan Tugas pemerintahan diarahkan pada upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan berbagai potensi yang ada di wilayah kabupaten. Prinsip dasar yang terkandung dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan dan telah di jelaskan sebelumnya dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 ayat 5, bahwa belanja negara di rinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Kepahiang mengacu pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),

Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan keuangan kabupaten Kepahiang ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para stakeholders di Kabupaten Kepahiang sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pembangunan di masa-masa mendatang. Menurut Mahmudi (2010: 2) terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas kinerja keuangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Terdapat dua alasan utama mengapa Pemerintah Daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu: 1. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi Pemerintah Daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kinerja di dalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio, Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk menghitung Kemampuan Keuangan Daerah, yaitu dengan cara menghitung Share dan Growth, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai pengambil andil terbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Akuntabilitas menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan penting untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Pengukuran kinerja adalah salah satu cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah.

### **Laporan Keuangan**

Salah satu alat penting dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi analisis laporan keuangan adalah laporan keuangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 Revisi Tahun 2009, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Mahsun Moh, dkk, (2011: 81), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah selama satu tahun”. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **Analisis Laporan Keuangan**

Analisis Rasio Keuangan digunakan untuk menghitung Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah.

#### **a. Analisis Kinerja Keuangan Daerah**

Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
3. Rasio Efektivitas
4. Rasio Efisiensi keuangan Daerah
5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah suatu penelitian yang ilmiah dan sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya. Pendekatan ini diawali dari data yang di proses menjadi informasi berharga bagi pengambilan keputusan.

### **Definisi Operasional**

#### **Laporan Realisasi Keuangan**

Laporan keuangan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2013-2017. Dalam penelitian di gunakan dari laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten kepahiang adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2013-2017 merupakan hak daerah yang di akui sebagai penambah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain yang sah

2. Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2013-2017 merupakan pengeluaran kas yang mengurangi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten kepahiang yang terdiri dari realisasi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

### Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang akan di ukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten kepahiang tahun anggaran 2013-2017 untuk mengukur kinerja keuangan tersebut ada beberapa ukuran kinerja keuangan yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
3. Rasio Efektivitas
4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

### Metode Pengumpulan Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2013-2017.

### Metode Analisis

Tahap-tahap yang di lakukan dalam menganalisis data ini dengan cara menghitung rasio keuangan berdasarkan data yang di peroleh dengan membuat tabel. Dalam menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten kepahiang tahun anggaran 2013-2017, rumus-rumus yang di gunakan antara lain:

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Langkah-langkah dalam menganilisi rasio kemandirian antara lain:

1. Membuat tabel PAD dan pendapatan transfer tahun anggaran
2. Menghitung rasio kemandirian dari tahun 2013-2017 dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{pendapatan transfer dan pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

KemampuanKeuangan	Kemandirian (%)	PolaHubungan
Rendah Sekali	0-25	Insturktif
Rendah	25-50	Kosultatif
Sedang	50-75	Partisipasif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Mahmudi (2009:142)

- b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Langkah-langkah dalam menganalisis rasio derajat desentraliasi fiskal antara lain :

1. Membuat tabel pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah

2. Menghitung rasio derajat desentralisasi fiskal dengan menggunakan persamaan

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Tabel 2. Skala interval Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fisikal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Mahmudi (2009:142)

c. Rasio Efektivitas

Langkah-langkah dalam menganalisis rasio efektivitas antara lain:

1. Membuat tabel anggaran pendapatan asli daerah dan realisasi penerimaan daerah
2. Menghitung rasio efektivitas PAD dengan menggunakan persamaan :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentasi Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
Di bawah 75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2009:143)

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Langkah-langkah dalam menganalisis rasio efisiensi keuangan daerah antara lain:

1. Membuat tabel belanja pemunggutan PAD dan realisasi penerimaan PAD
2. Menghitung rasio efisiensi dengan menggunakan persamaan :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Peresentase Efisiensi %	Kriteria Efisiensi
>100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
<60	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2009:143)

e. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Langkah-langkah dalam menganalisis rasio ketergantungan keuangan daerah antara lain:

1. Membuat tabel pendapatan transfer dan pendapatan daerah
2. Menghitung rasio ketergantungan keuangan daerah dengan menggunakan persamaan :

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5 Kategori ketergantungan keuangan daerah

Ketergantungan Keuangan	Persentase(%)
Sangat Rendah	0,00-10,00
Rendah	10,01-20,00
Sedang	20,01-30,00
Cukup	30,01-40,00
Tinggi	40,01-50,00
Sangat tinggi	>50

Sumber: Mahmudi (2009:142)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang (terlampir), akan dianalisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah dan pembangunan. kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 6. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Tranfer (Rp)	Rasio (%)	Kriteria	Pola Huubungan
2013	19.467.833.938,40	472.947.352.982,50	4,12	Rendah Sekali	Instrurktif
2014	28.183.721.899,10	546.453.835.118,37	5,16	Rendah Sekali	Instrurktif
2015	28.018.903.714,02	589.130.527.271,22	4,76	Rendah Sekali	Instrurktif
2016	31.455.382.716,17	650.996.024.189,07	4,83	Rendah Sekali	Instrurktif
2017	30.212.642.457,48	650.589.925.014,02	4,64	Rendah Sekali	Instrurktif
Rasio Rata-Rata			4,70	Rendah Sekali	Instrurktif

Sumber: Data Diolah, 2019

Keterangan:

- 0% - 25% : Rendah Sekali : Insturktif  
 25% - 50% : Rendah : Kosultatif  
 50% - 75% : Sedang : Partisipasif  
 75% - 100% : Tinggi : Delekatif

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

Rasio rasio derajat desentralisasi fiskal ini menunjukan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang di berikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan pembangunan daerahnya. Rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapat Daerah}} \times 100$$

Tabel 7. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2013	19.467.833.938,40	492.415.186.920,90	3,95	Sangat Kurang
2014	28.183.721.899,10	584.293.557.017,47	4,82	Sangat Kurang
2015	28.018.903.714,02	622.149.430.985,24	4,50	Sangat Kurang
2016	31.455.382.716,17	684.470.406.905,24	4,60	Sangat Kurang
2017	30.212.642.457,48	693.802.567.471,50	4,35	Sangat Kurang
Rasio Rata-Rata			4,45	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah, 2019

Keterangan:

- 0,00% - 10,00% : Sangat Kurang  
 10,01% - 20,00% : Kurang  
 20,01% - 30,00% : Cukup  
 30,01% - 40,00% : Sedang  
 40,01% - 50,00% : Baik  
 >50,00 : Sangat Baik

c. Rasio Efektivitas.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam merealisasikan yang di rencanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

Tabel 8. Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2013	19.467.833.938,40	13.500.845.000,00	144,20	Sangat Efektif
2014	28.183.721.899,10	28.557.202.397,82	98,69	Cukup Efektif
2015	28.018.903.714,02	33.480.121.494,82	83,69	Kurang Efektif
2016	31.455.382.716,17	30.714.880.486,47	102,41	Sangat Efektif
2017	30.212.642.457,48	33.534.572.486,47	90,09	Cukup Efektif
Rasio Rata-Rata			103,83	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah, 2019

Keterangan:

Di atas 100% : Sangat Efektif

100% : Efektif

90% - 99% : Cukup Efektif

75% - 89% : Kurang Efektif

Di bawah 75% : Tidak Efektif

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja daerah dibandingkan realiasi pendapatan daerah yang diterima. Rasio efisiensi keuangan daerah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 9. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2013	462.747.720.903,00	492.415.186.920,90	93,98	Kurang Efisien
2014	553.600.632.934,13	584.293.557.017,47	94,75	Kurang Efisien
2015	630.664.880.249,45	622.149.430.985,24	101,37	Tidak Efisien
2016	572.655.181.977,63	684.470.406.905,24	83,66	Cukup Efisien
2017	558.167.731.691,24	693.802.567.471,50	80,45	Cukup Efisien
Rasio Rata-Rata			90,84	Kurang Efisien

Sumber: Data Diolah, 2019

Keterangan:

>100% : Tidak Efisien

90%-100% : Kurang Efisien

80%-90% : Cukup Efisien

60%-80% : Efisien

<60% : Sangat Efisien

e. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah di gunakan untk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang dalam meningkatkan pendapatan daerah, yang di ukur dengan rasio antara pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dihitung sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 10. Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2013	472.947.352.982,50	492.415.186.920,90	96,05	Sangat Tinggi
2014	546.453.835.118,37	584.293.557.017,47	93,52	Sangat Tinggi
2015	589.130.527.271,22	622.149.430.985,24	94,69	Sangat Tinggi
2016	650.996.024.189,07	684.470.406.905,24	95,11	Sangat Tinggi
2017	650.589.925.014,02	693.802.567.471,50	93,77	Sangat Tinggi
Rasio Rata-Rata			94,63	Sangat Tinggi

Sumber: Data Diolah, 2019

Keterangan:

- 0,00% - 10,00% : Sangat Rendah
- 10,01% - 20,00% : Rendah
- 20,01% - 30,00% : Sedang
- 30,01% - 40,00% : Cukup
- 40,01% - 50,00% : Tinggi
- >50% : Sangat tinggi

## PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian analisis rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2013-2017, secara keseluruhan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum mampu membiayai seluruh pengeluaran atau belanja daerah yang bersumberkan dari PAD tetapi masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat, hal ini dapat terlihat dari beberapa rasio yang telah analisis sebelumnya, antara lain:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dari hasil penelitian pada tabel 6, menunjukkan dari tahun 2013-2017, Kabupaten Kepahiang masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat yang terlihat dari hasil rasio berada pada interval 0%-25% dengan kriteria rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, artinya menunggu intruksi dari Pemerintah Pusat. Untuk lebih jelas perkembangan rasio kemandirian dari tahun 2013-2017 terlihat pada gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah



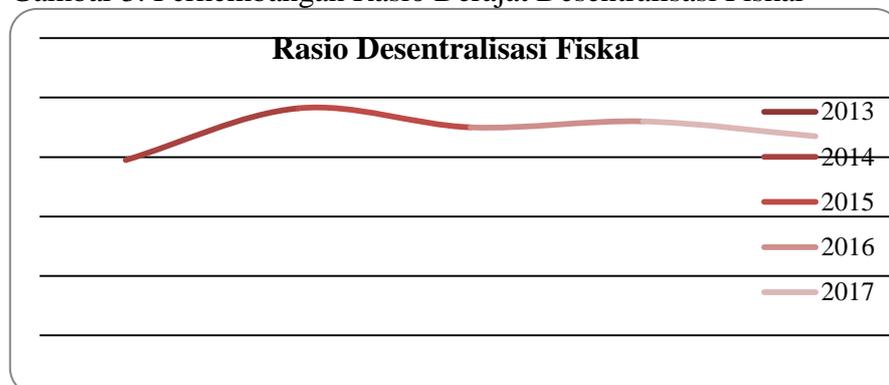
Sumber: Tabel 6 Diolah, 2019

Dari gambar 2 di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Kabupaten Kepahiang hanya naik pada tahun 2014 dari 4,12% menjadi 5,16%, kemudian tahun 2015 turun kembali menjadi 4,76% begitu juga pada tahun 2016 naik menjadi 4,83% dan turun menjadi 4,64% pada tahun 2017 dan secara rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2013-2017 adalah 4,70%. Kenaikkan ataupun penurunan rasio kemandirian keuangan daerah lebih disebabkan kenaikan PAD juga diiringi dengan kenaikan belanja daerah sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang menaikkan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam bentuk pendapatan transfer.

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Dari hasil penelitian pada tabel 7, menunjukkan dari tahun 2013-2017, Kabupaten Kepahiang belum mampu menyelenggarakan desentralisasi atau kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang ditunjukkan angka rasio derajat desentralisasi fiskal masih berada pada interval 0,00-10,00 dengan kriteria sangat kurang atau masih berada pada interval yang terendah. Untuk lebih jelas perkembangan rasio derajat desentralisasi fiskal dari tahun 2013-2017 terlihat pada gambar 3 di bawah ini.

Gambar 3. Perkembangan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

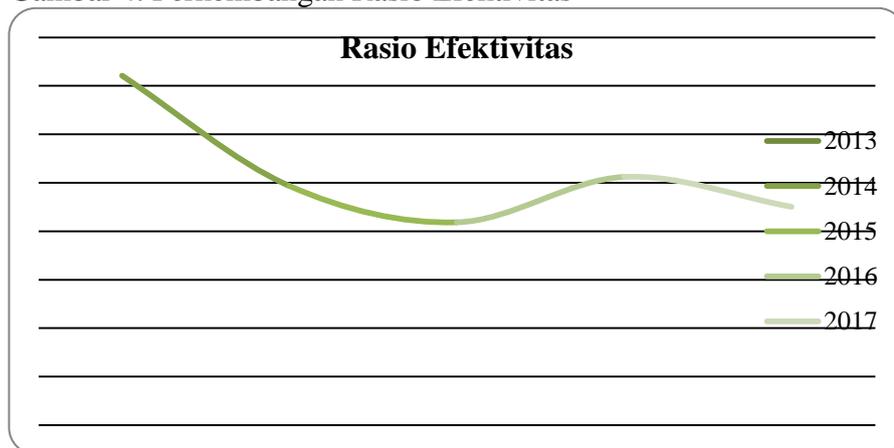


Sumber: Tabel 8, Diolah 2019

c. Rasio Efektivitas

Dari hasil penelitian pada tabel 8, menunjukkan dari tahun 2013-2017, Kabupaten Kepahiang mampu merealisasikan PAD yang telah dianggarkan atau ditargetkan dengan kriteria pada tahun 2013 dan 2016 sangat efektif, tahun 2014 dan 2017 dengan kriteria efektif, sedangkan pada tahun 2015 dengan kriteria kurang efektif. Untuk lebih jelas perkembangan rasio efektivitas dari tahun 2013-2017 terlihat pada gambar 4 di bawah ini.

Gambar 4. Perkembangan Rasio Efektivitas

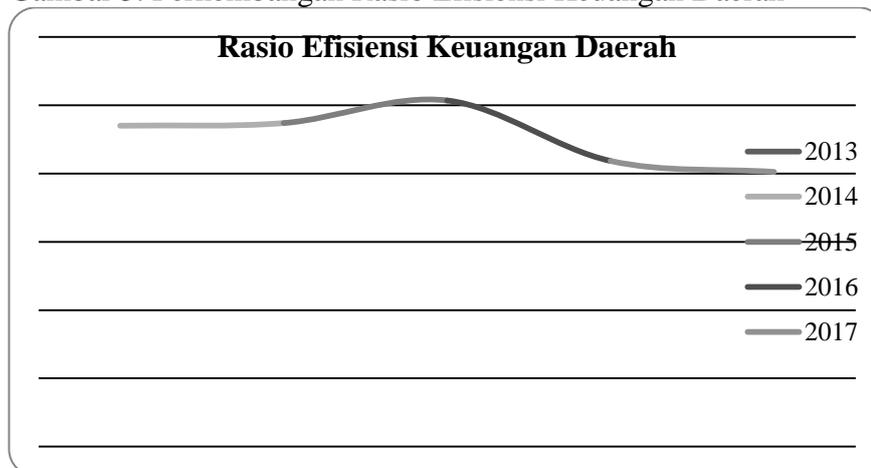


Sumber: Tabel 9, Diolah 2019

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Dari hasil penelitian pada tabel 9, rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Kepahiang dari tahun 2013-2017, menunjukkan bahwa belanja daerah atau pengeluaran daerah masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan PAD. Rasio efisiensi keuangan daerah masih jauh di atas 100% bahkan di atas 1.000% dengan kriteria tidak efisien.

Gambar 5. Perkembangan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah



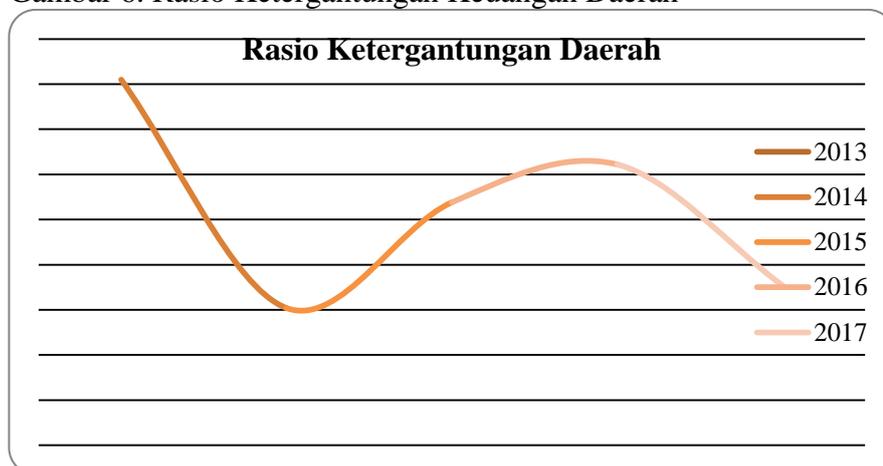
Sumber: Tabel 10, Diolah 2019

Dari gambar 5 di atas bahwa tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2014 turun dari 93%,98 menjadi 94,75%, begitu juga tahun 2015 turun kembali menjadi 101,37%. Pada tahun 2016 kembali melakukan efisiensi dengan nilai rasio 83,66% dan 80,45% pada tahun 2017.

e. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Dari hasil penelitian pada tabel 10, rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Kepahiang dari tahun 2013-2017, Pemerintah Kabupaten Kepahiang mempunyai ketergantungan keuangan yang sangat tinggi pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, hal ini ditunjukkan angka rasio ketergantungan keuangan daerah dari tahun 2013-2017 berada di atas 50% dengan rata-rata nilai rasio 2.138,77 dengan kriteria sangat tinggi. Untuk lebih jelas perkembangan rasio ketergantungan keuangan daerah dari tahun 2013-2017 terlihat pada gambar 6 di bawah ini.

Gambar 6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah



Sumber: Tabel 10, Diolah 2019

Dari pembahasan di atas bahwa ketiga rasio yaitu rasio kemandirian daerah keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang belum mampu melaksanakan otonomi daerah dengan keuangan daerah yang bersumberkan dari PAD. Hal ini merujuk pada teori yang dijelaskan oleh Koswara dalam Halim (2012:167), bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu melaksanakan otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, yaitu:

- Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus menjadi bagian dari sumber keuangan, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan Pemerintah Daerah menjadi lebih besar.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Rasio kemandirian keuangan daerah diketahui rasio rata-rata sebesar 4,70% berada pada interval 0%-25% dengan kriteria rendah sekali dan pola hubungan intruktif, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang belum mandiri.
- b. Rasio derajat desentralisasi fiskal diketahui rasio rata-rata sebesar 4,45% berada pada interval 0,00%-10% dengan kriteria sangat kurang, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang belum mampu menyelenggarakan desentralisasi atau kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- c. Rasio efektivitas diketahui rasio rata-rata sebesar 103,82% dengan kriteria sangat efektif, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang mampu merealisasi anggaran atau target PAD yang telah ditetapkan walaupun pada tahun 2014 dan 2017 cukup efektif dan tahun 2015 kurang efektif.
- d. Rasio efisiensi keuangan daerah diketahui rasio rata-rata 90,84% dengan kriteria kurang efisien, artinya belanja daerah atau pengeluaran daerah Kabupaten Kepahiang masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah.
- e. Rasio ketergantungan keuangan daerah diketahui rasio rata-rata 94,63% dengan kriteria sangat tinggi, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja atau pengeluaran daerah.

## **SARAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan disarankan, sebagai berikut:

- a. Hasil rasio kemandirian berada pada kriteria sangat rendah, untuk itu disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang melalui Badan Keuangan Daerah untuk menggali dan mengelolah sumber PAD dengan baik sehingga daerah lebih mandiri dan dapat membiayai belanja daerah daerah sumber PAD.
- b. Hasil rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang masih sangat kurang untuk melaksanakan pembangunan, untuk itu sama halnya dengan rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang harus dapat meningkatkan PAD.
- c. Hasil rasio efektivitas menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sudah sangat efektif dalam mengelola PAD, tetapi hal itu hanya terbatas dapat merealisasi target PAD, tetapi sejarah total PAD harus tetap ditingkatkan.
- d. Hasil Rasio efisiensi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang tidak efisien sama halnya dengan rasio sebelumnya karena kecilnya PAD, untuk itu PAD harus terus ditingkatkan.
- e. Hasil rasio ketergantungan menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang masih sangat tinggi, untuk itu sama halnya dengan rasio sebelumnya harus dapat meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya dari sumber PAD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV . Salemba Empat. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta. BPFE.
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. PT. Toko Gunung Agung. Jakarta.
- Mahmudi. 2009. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ke II. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, Sulistiyowati, Firma dan Purwanugraha, Heribertus Andre. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Pasal 30 UU Nomor 5 tahun 1975
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1
- Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Permendagri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- Standar Akuntansi Keuangan 1 Revisi Tahun 2009
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. CV Alfabeta.
- Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991, dalam I Dewa Gde Bisma Dan Hery Susanto, 2010
- Ulum Ihyahul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah